BAB II

PEMBIMBINGAN OLEH BALAI PEMASYARAKATAN TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM MENYELESAIKAN PERKARA PIDANA MELALUI KEADILAN RESTORATIF DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM TEORI

A. Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

1. Konsepsi Anak dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian kedudukan anak dari pandangan sistem hukum sebagai subjek hukum.

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak menyebutkan bahwa :¹

“Secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.”

¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Amirko, 1984, hlm 25.

Arif Gosita pun menyatakan bahwa:²

“Oleh karna itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk social yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kalidi tempatkan dalam posisi yang paling di rugikan, tidakmemiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.”

Sugiri pun mengatakan bahwa:³

"Selama di tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, anak itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa bila proses perkembangan dan pertumbuhan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk wanita dan 21 (dua puluh) tahun untuk laki-laki."

Dilanjut oleh R.A. Kosnan yang menjelaskan bahwa pengertian anak, ialah:⁴

“Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.

Menurut Bisma Siregar, dalam bukunya yang berjudul “Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional” menyatakan bahwa:⁵

“Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hokum tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 tahun atau 18 tahun ataupun usia tertentu yang menurut perhitungan pada usia itulah si anak bukan lagi termasuk atau tergolong anak tetapi sudah dewasa.”

² Arif Gosita, *Masalah perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm 28

³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cetakan Kedua, P.T.Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm 32.

⁴ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005, hlm 113.

⁵ Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm 105

Selanjutnya Hanafi dalam bukunya yang berjudul “Asas-Asas Hukum Pidana” pun mengemukakan bahwa:⁶

“Pengertian anak dalam berbagai disiplin ilmu berbeda-beda dan penulis hanya memaparkan pengertian anak dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Hukum Islam telah menetapkan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seorang manusia yang telah mencapai umur tujuh tahun dan belum balligh, sedang menurut kesepakatan para ulama, manusia dianggap balligh apabila mereka telah mencapai usia 15 tahun.”

United Nations Children’s Fund (UNICEF) memberikan definisi Anak, yaitu:⁷

“Anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia lima atau enam tahun, periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar.”

“Pengertian anak (*juvenile*) pada umumnya adalah seorang yang masih di bawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin. Pada beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia mengenai batasan umur berbeda-beda. Perbedaan tersebut bergantung dari sudut manakah pengertian anak dilihat dan ditafsirkan. Hal ini tentu ada pertimbangan aspek psikis yang menyangkut kematangan jiwa seseorang.”

Menurut **Nicholas McBala** dalam buku *Juvenile Justice System* mengatakan bahwa anak ialah:⁸

“Periode di antara kelahiran dan permulaan kedewasaan. Masa ini merupakan masa perkembangan hidup, juga masa dalam keterbatasan kemampuan termasuk keterbatasan untuk membahayakan orang lain.”

⁶ A.hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1994. hlm 369.

⁷ Wikipedia, *Pengertian Anak*, <https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>, Diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

⁸ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 36

Andy Lesmana dalam tulisannya yang terdapat pada salah satu laman sosial, menyebutkan bahwa pengertian anak ialah:⁹

“Seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.”

Andy Lesmana menyebutkan juga bahwa:¹⁰

“Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.”

Sholeh Soeaidy dan Zulkhair menyebutkan bahwa:¹¹

“Ditinjau dari aspek yuridis, maka pengertian “anak” dimata hukum positif di Indonesia lazim diartikan sebagai orang yang belum dewasa (*minderjaring atau person under age*), orang yang dibawah umur atau keadaan dibawah umur (*minderjaringheid atau inferionity*) atau kerap juga disebut sebagai anak yang dibawah pengawasan wali (*minderjarige onvervoodij*).”

Anak perlu mendapat perlindungan dari dampak negatif perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan

⁹ Andy Lesmana, *Definisi Anak*, <https://www.kompasiana.com/alesmana/55107a56813311573bbc6520/definisi-anak?page=all>, diakses pada tanggal 26 Februari 2020.

¹⁰ *Ibid*

¹¹ Sholeh Soeaidy dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hlm. 5.

masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku Anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Anak, antara lain, disebabkan oleh faktor di luar diri Anak tersebut.

Selain pengertian anak menurut para ahli, di Indonesia sendiri terdapat beberapa pengertian tentang anak yang terdapat pada peraturan perundang-undangan, sekaligus batasan usia anak. Namun di antara beberapa pengertian tidak ada kesamaan mengenai pengertian anak tersebut, karna di latar belakang dari maksud dan tujuan masing-masing Undang-Undang. Diantaranya yaitu:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHPidana menyatakan bahwa:

“Anak adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.”

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 45 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP) ialah apabila seseorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dikerjakannya ketika umurnya belum mencapai enam belas tahun, maka hakim boleh memerintahkan supaya si tersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau pemeliharanya, dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya si tersalah diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.

2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, menyatakan bahwa:

“Orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.”

Batas usia menurut Hukum Perdata meletakkan batasan usia anak berdasarkan Pasal 330 KUHPer yang menjelaskan bahwa batas antara usia belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*), yaitu 21 (dua puluh satu) tahun; Dan seorang anak yang berada dibawah usia 21 (dua puluh satu) tahun yang telah menikah dianggap telah dewasa.”

Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak;

3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.”

4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.”

- 5) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak

Pasal 1 bagian 1 Konvensi Hak-Hak Anak (Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak), menyatakan bahwa:

“Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan Undang-Undang lain yang berlaku bagi anak-anak ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal.”

- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

- 7) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Pengelompokan ini dimasukkan untuk mengenal secara pasti faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya tanggung jawab terhadap anak, proses Peradilan Pidana Anak mulai dari penyidikan, penuntutan, pengadilan, dan dalam menjalankan putusan pengadilan di lembaga pemasyarakatan anak wajib oleh dilakukan oleh pejabat-pejabat yang terdidik khusus atau setidaknya mengetahui masalah tentang anak.

Selain itu dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan pula tentang pengertian Anak yang berhadapan dengan hukum, yang mana berbunyi:

“Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.”

Data Anak yang berhadapan dengan hukum dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menunjukkan bahwa tingkat kriminalitas serta pengaruh negatif penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif semakin meningkat. Prinsip perlindungan hukum terhadap Anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu :¹²

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah; dan
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewaa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Menurut ahli psikologi kematangan seorang anak tidak dapat ditentukan dari usia, dengan alasan:¹³

“Karena ada anak yang berusia lebih muda akan tetapi sudah matang dalam berpikir. Sebaliknya, ada anak sudah dewasa akan tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Pandangan ahli psikologi tersebut menjadi permasalahan dan pertanyaan besar bagi para ahli pidana dan psikologi dalam penetapan batas usia pertanggungjawaban pidana.”

¹² Harry E. Allen and Clifford E. Simmons dalam Purniati, Mamik, Sri Supatmi, dan Ni Made Martini Tinduk, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2003, hlm.2.

¹³ Marlina, *Op.cit*, hlm. 36

Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai ancaman kekerasan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam pelaksanaan Peradilan Pidana Anak yang asing bagi dirinya.

Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*). Untuk menetapkan ketentuan hukum yang berprospek dalam menetapkan batas usia maksimum dari seorang anak, terdapat pendapat yang sangat beraneka ragam. Batas usia anak yang layak dalam pengertian hukum nasional dan hukum internasional (Konvensi Hak Anak/CRC), telah dirumuskan kedalam bangunan-bangunan pengertian yang ditetapkan oleh spesifikasi hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan tentang Perlindungan Anak, yakni:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Seorang anak yang melakukan tindak pidana sangat membutuhkan perlindungan hukum bagi dirinya. Adapun prinsip-prinsip perlindungan menurut Irwanto yaitu:¹⁴

1. Anak Tidak Dapat Berjuang Sendiri

¹⁴ Irwanto, *Analisis Konsep Perlindungan Anak Dan Implemntasinya*, http://www.academia.edu/10246553/ANALISIS_KONSEP_PERLINDUNGAN_ANAK_DAN_I_MPLEMENTASINYA_DI_INDONESIA_Kajian_awal_, Diakses pada tanggal 10 Februari 2020, Pukul 17.30 WIB

Anak adalah modal utama kelangsungan hidup manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus dilindungi;

2. Kepentingan Terbaik Bagi Anak (the best interest of the child)

Prinsip ini menyatakan bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus dipandang of paramount importance (memperoleh prioritas tinggi) dalam setiap keputusan yang menyangkut anak;

3. Ancangan Daur Kehidupan (Life-Circle Approach)

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus;

4. Lintas Sektoral

Nasib anak tergantung dari berbagai faktor yang makro maupun mikro yang langsung maupun tidak langsung.

Perlakuan selama proses peradilan pidana anak harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak dan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat anak tanpa mengabaikan terlaksananya keadilan, dan bukan membuat nilai kemanusiaan anak menjadi lebih rendah. Untuk itu diusahakan agar penegak hukum tidak ahli dalam bidang ilmu hukum saja akan tetapi terutama jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat kita ketahui bersama bahwa pengertian dari Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Hal ini sesuai dengan batas usia minimum anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Perbuatan dan Faktor-faktor Delinkuensi (*Juvenil Delinquency*)

Istilah delinkuen berasal dari *delinquency*, yang diartikan dengan kenakalan anak, kenakalan remaja, kenakalan pemuda dan delinkuesi. Kata delinkuensi atau *delinquency* dijumpai bergandengan dengan kata *juvenile*, dikarena *delinquency* erat kaitannya dengan anak, sedangkan kata *delinquent act* diartikan perbuatan yang melanggar norma dasar dari masyarakat. Perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh kelompok anak-anak, maka disebut *delinquency*. Jadi *delinquency* mengarah pada pelanggaran terhadap aturan yang dibuat kelompok sosial masyarakat tertentu bukan hanya hukum negara saja.¹⁵

Sebagai perbandingan di Amerika Serikat “*Juvenile Delinquency*” sesuai dengan Kitab Undang-Undang Amerika Serikat (U.S. code) yaitu:¹⁶

“*Juvenile delinquency is violation of the law committed by a person under the age of 18 that would be considered a crime if it was committed by a person 18 or older*”. (juvenile delinquency adalah pelanggaran yang dilakukan seseorang yang berumur dibawah 18 tahun yang mana hal tersebut digolongkan sebuah kejahatan jika dilakukan oleh orang yang berumur 18 tahun atau lebih tua).”

Menurut **Anthony M. Platt** definisi *delinquency* adalah:¹⁷

“Perbuatan anak yang meliputi: (1) perbuatan tindak pidana bila dilakukan oleh orang dewasa; (2) perbuatan yang melanggar aturan negara atau masyarakat; (3) perilaku

¹⁵ Richard A. Cloward and Lloyd E. Ohlin, *Delinquency and Opportunity Theory of Delinquent Gangs*, New York: The Free Press, A. Division of Macmillian Publishing co.Inc, 1960, hlm. 2-5

¹⁶ *Ibid*, hlm. 18

¹⁷ Anthony M. Platt, *The Child Savers: The Invention of Delinquency*, Chicago: The University of Chicago Press, Second Edition, Enlarged, 1977, hlm. 138

tidak bermoral yang ganas, pembolosan, perkataan kasar dan senonoh, tumbuh dijalan dan pergaulan dengan orang yang tidak baik yang memungkinkan pengaruh buruk bagi anak di masa depan.”

Paul Tappan mengemukakan bahwa:¹⁸

“*Juvenile delinquent is a person who has been adjudicated as such by a court of proper jurisdiction though he may be no different.* (anak yang delinkuen adalah seseorang yang telah diputus dengan yurisdiksi pengadilan yang tepat meskipun mungkin putusan pengadilan dan putusan hasil berbeda, meskipun bukan dari kelompok anak yang tidak delinkuen).”

Dari pengertian tersebut maka dapat kita artikan bersama bahwa *Juvenile* adalah perilaku seorang anak yang melanggar norma-norma yang ada di lingkungan sekitarnya dan perilaku tersebut dapat dijerat oleh kewenangan dari pengadilan anak.

Pengertian *Delinquency* menurut Simanjuntak ialah:¹⁹

“a. Juvenile delinquency berarti perbuatan dan tingkah laku yang merupakan perbuatan perkosaan terhadap norma hukum pidana dan pelanggaran-pelanggaran terhadap kesusilaan yang dilakukan oleh para delinquent.
b. juvenile delinquent itu adalah pelaku yang terdiri dari anak (berumur dibawah 21 tahun (pubertas), yang termasuk yurisdiksi pengadilan anak/juvenile court.”

Selanjutnya menurut Kartini Kartono yang mengemukakan bahwa *Juvenile Delinquency* ialah:²⁰

“Perilaku jahat atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah

¹⁸ Paul W. Tappan, *Juvenile Delinquency*, New York : Mc. Graw Hill Book Inc. Toronto London, 1949, hlm. 30

¹⁹ Simanjuntak, *Latar Belakang Kenakalan Remaja*, Cetakan 2, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 60

²⁰ Kartini Kartono, *Patologi Sosial 2 Kenakalan Remaja*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 6

laku yang menyimpang. *Juvenile* berasal dari bahasa latin *juvenilis* artinya anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda dan sifat sifat khas pada periode remaja. *Delinquen* berasal dari kata latin *delinquere* yang artinya terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain. *Delinquency* berkonotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak muda dibawah usia 22 tahun.”

Perihal *Juvenile Delinquency* dan hubungannya dengan pengertian anak, Menurut Romli Atmasasmita istilah *Delinquency* tidak identik dengan istilah anak. Istilah *Juvenile Delinquency* lebih luas artinya daripada istilah kenakalan ataupun istilah anak-anak. Oleh karena itu, Romli lebih cenderung menggunakan istilah kenakalan anak daripada istilah kejahatan anak-anak.

Tingkah laku menjurus kepada masalah *Juvenile Delinquency* itu menurut Alder, diantaranya :²¹

1. Kebut-kebutan di jalan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri dan orang lain;
2. Perilaku ugal-ugalan, berandal, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitarnya. Tingkah ini bersumber pada kelebihan energi dan dorongan primitif yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan;
3. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran) sehingga kadang-kadang membawa korban jiwa;
4. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat-tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam-macam kedurjanaan dan tindakan a-susila;

²¹ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Anak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.31-33.

5. Kriminalitas anak, remaja, dan adolesens antara lain perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, mencuri, mencopet, merampas, menjambret, menyerang, merampok, mengganggu, menggarong, melakukan pembunuhan dengan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindak kekerasan dan pelanggaran lainnya;
6. Berpesta pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, atau orgi (mabukmabukan yang menimbulkan kacau balau) yang mengganggu sekitarnya;
7. Perkosaan, agresivitas seksual, dan pembunuhan dengan motif sosial, atau didorong oleh reaksi-reaksi kompensatoris dari perasaan inferior, menuntut pengakuan diri depresi, rasa kesunyian, emosi, balas dendam, kekecewaan, ditolak cintanya oleh seorang wanita dan lain-lain;
8. Kecanduan dan ketagihan Narkoba (obat bius, drug, opium, ganja) yang erat kaitannya dengan kejahatan;
9. Tindakan-tindakan immoral seksual secara terang-terangan tanpa tedeng aling-aling, tanpa malu dengan cara kasar. Ada seks dan cinta bebas tanpa kendali (*promiscuity*) yang didorong oleh hiperseksualitas, dorongan menuntut hak, dan usaha-usaha kompensasi lainnya yang kriminal sifatnya;
10. Homoseksualitas, erotisme anak dan oral serta gangguan seksualitas lainnya pada anak remaja disertai dengan tindakan-tindakan sadis;
11. Perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan sehingga menimbulkan akses kriminalitas;
12. Komersialisasi seks, pengguguran janin oleh gadis-gadis delinkuen dan pembunuhan bayi-bayi oleh ibu-ibu yang tidak kawin;
13. Tindakan radikal dan ekstrem dengan jalan kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak remaja;
14. Perbuatan a-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anakanak dan remaja psikopatik, neurotic dan menderita gangguan jiwa lainnya;
15. Tindak kejahatan disebabkan oleh penyakit tidur (*encephalitics lethargoical*) dan ledakan meninngitis serta post-encephalitics juga luka di kepala dengan kerusakan otak yang adakalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu mengendalikan diri; dan
16. Penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh kerusakan pada karakter anak yang menuntut

kompensasi, disebabkan adanya organorgan yang inferior.

Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya yang berjudul “Penanggulangan Kejahatan” mengatakan bahwa kenakalan anak mencakup 3 (tiga) pengertian, diantaranya yaitu:²²

- a. Perbuatan yang dilakukan orang dewasa merupakan tindak pidana (kejahatan), akan tetapi bila dilakukan oleh anak-anak belum dewasa dinamakan delinquency seperti pencurian, perampokan, dan pembunuhan.
- b. Perbuatan anak yang menyeleweng dari norma kelompok yang menimbulkan keonaran seperti kebut-kebutan, perkelahian kelompok, dan sebagainya.
- c. Anak-anak yang hidupnya membutuhkan bantuan dan perlindungan, seperti anak-anak terlantar, yatim piatu, dan sebagainya, yang jika dibiarkan berkeliaran dapat berkembang menjadi orang-orang jahat.

Menurut Romli Atmasasmita bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu :²³

“Berbicara tentang kenakalan anak tidak terlepas dari adanya faktor-faktor yang mendorong dan yang memotivasi seorang anak sehingga anak melakukan kenakalan, yang dimana nantinya akan menimbulkan reaksi dari anak untuk kenakalan yang diperbuatnya yakni motivasi instrinstik dan ekstrenstik.”

Edwin H. Sutherland berpendapat bahwa :²⁴

“Perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi Edwin H. Sutherland berhipotesis bahwa perilaku kriminal itu dipelajari melalui asosiasi ang dilakukan dengan mereka yang melanggar norma-norma masyarakat termasuk norma hukum. Proses yang dipelajari tadi meliputi tidak hanya teknik kejahatan sesungguhnya namun juga motif, dorongan sikap dan rasionalisasi yang nyaman atau memuaskan bagi dilakukannya perbuatan-perbuatan anti sosial.”

²² Soedjono Dirdjosisworo, *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni , Bandung, 1983, hlm. 150

²³ Romli Atmasasmita, *Problematika Kenakalan Anak-Anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, hlm.46.

²⁴ Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Edisi Revisi, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 42

Teori Asosiasi Diferensial mengenai kejahatan menegaskan bahwa :²⁵

1. Tingkah laku kriminal dipelajari;
2. Tingkah laku kriminal dipelajari dalam hubungan interaksi dengan orang lain melalui suatu proses komunikasi;
3. Bagian penting dari mempelajari tingkah laku kriminal terjadi dalam kelompok yang intim;
4. Mempelajari tingkah laku kriminal, termasuk didalamnya teknik melakukan kejahatan dan motivasi/dorongan atau alasan pembeda;
5. Dorongan tertentu ini dipelajari melalui penghayatan atau peraturan perundang-undangan: menyukai atau tidak menyukai;
6. Seseorang menjadi delinquent karena penghayatannya terhadap peraturan perundang-undangan: lebih suka melanggar daripada menaatinya;
7. Asosiasi diferensial ini bervariasi bergantung pada frekuensi, durasi, prioritas, dan intensitas;
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar; dan
9. Sekalipun perilaku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai, namun perilaku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi karena perilaku non kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai yang sama.

Teori kontrol sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama untuk menjadi “baik” atau menjadi “jahat”. Baik atau jahatnya seseorang sepenuhnya ditentukan oleh masyarakatnya. Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok sosial konvensional, seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu.

²⁵ *Ibid*, hlm. 42

Mengingat semua orang dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, Para teorisi kontrol sosial memandang *deliquent* sebagai:²⁶

“Konsekuensi logis kegagalan seseorang untuk mengembangkan larangan-larangan ke dalam terhadap perilaku melanggar hukum.”

Perbedaan definisi delinkuensi menyebabkan adanya kesulitan dalam menentukan macam-macam jenis tingkah laku yang termasuk perbuatan delinkuen. Maka kita simpulkan bersama bahwa delinkuensi adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan adat istiadat atau norma-norma hukum atau aturan-aturan tertentu yang berlaku didalam kelompok masyarakat atau negara dimana anak tersebut bertempat tinggal yang bersifat anti sosial dan/atau melawan hukum.

Salah satu faktor timbulnya delinkuensi oleh anak yaitu:²⁷

“Keadaan struktruk sosial dan budaya yang ada di sekitarnya. Hal ini seperti perkembangan struktur masyarakat sekitar dan keluarga seperti konflik orangtua. Bahkan delinkuensi pun dapat terjadi karna adanya aturan sosial yang tidak dapat dipenuhi oleh anak sehingga dia dianggap melanggar norma yang ditetapkan oleh suatu kelompok dalam masyarakat sosial yang ada di sekitarnya.”

Kathleen Salle berdasarkan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa beberapa faktor sosial yang menyebabkan delinquency yaitu:²⁸

1. Jenis kelamin dan perilaku delinkuensi

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Anthony M Platt, *Op.cit.*, hlm. 8

²⁸ Marlina, *Op.cit.*, hlm. 148

Anak perempuan lebih sedikit keterlibatannya dengan delinkuensi dan lebih jarang dalam kejahatan dibanding anak laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak-anak yang dilaporkan melakukan tindak pidana di kepolisian, jumlah kasus perkara pidana yang masuk dan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bandung dan jumlah anak yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak yang ada di Bandung.

2. Adanya pengaruh teman bermain anak

Anak yang bergaul dengan anak yang tidak sekolah dan kurang perhatian dari orang tuanya maka anak tersebut besar kemungkinan akan melakukan delinkuensi.

3. Kebanyakan anak yang melakukan kejahatan adalah anak-anak dari kelas ekonomi rendah/lemah.

Perilaku kriminal ini disebabkan oleh kekurangan fasilitas untuk bermain dan belajar yang sesuai dengan masa perkembangan kejiwaan anak. Di samping itu, orang tua mereka kurang memerhatikan kebutuhan anak-anaknya dikarenakan keterbatasan ekonomi, sehingga pada akhirnya anak-anak tersebut harus melakukan kegiatan-kegiatan yang menurutnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Di samping itu, dikarenakan kekurangan uang menyebabkan anak-anak mengambil barang orang lain untuk memilikinya/ memenuhi kebutuhan pribadinya. Seperti anak melakukan pencurian sandal dan pakaian, anak mengambil mainan temannya, anak mengambil tape mobil, dan sebagainya.

4. Disamping kekurangan ekonomi, kebanyakan anak yang terlibat dalam delinkuensi adalah anak-anak yang berasal dari keluarga broken home.

Kemudian L Edward Wells dan H. Rankin pun melakukan penelitian serupa. Melalui sebuah penelitian yang berjudul “*Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes Social Problem*” mereka mempelajari hubungan *Broken Home* dan *Delinquency*, dan didapatkan kesimpulan bahwa:²⁹

1. “*Broken home* memiliki kemungkinan menyebabkan *delinquency* sebesar 10-15% lebih tinggi daripada yang tidak broken home;
2. *Broken home* dan *delinquency* memiliki hubungan yang lebih kuat pada bentuk-bentuk kriminal ringan terhadap anak pelaku dan tidak begitu mempengaruhi pada kriminal serius (seperti pencurian dan kekerasan kepada seseorang);
3. *Broken home* memiliki bentuk yang menentukan apakah dapat menyebabkan *delinquency* atau tidak. *Broken home* yang disebabkan perceraian orang tua lebih kuat daripada karena orang tua yang meninggal.
4. Umur anak pada saat broken home tidak mempengaruhi *delinquency*.
5. Tidak ada perbedaan pengaruh broken home pada anak laki-laki atau perempuan.”

3. Hak-hak Anak

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah Bangsa dan Negara. Anak memiliki peran yang sangat penting. Hak anak telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi bangsa kita, bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan

²⁹ L. Edward Well dan Joseph H. Rankin, *Families and Delinquency: A Meta-Analysis of the Impact of Broken Homes Social Problems*, London, 1991, hlm. 87-88.

berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati, sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kita semua haruslah selalu berupaya agar jangan sampai anak menjadi korban kekerasan, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya serta selalu melindungi hak-hak anak guna mencapai tujuan perlindungan anak.

Shanty Dellyana mengemukakan bahwa untuk mencapai tujuan perlindungan anak terdapat beberapa hal yang harus diusahakan. Ia mengemukakan bahwa:

“Perlu diusahakan suatu kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya, dan sedapat mungkin harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.”

Ketika kita memberikan hak-hak anak yang secara otomatis pula menjadi perwujudan perlindungan hak anak, tentunya untuk semua kategori anak termasuk pula terhadap anak yang berhadapan dengan hukum atau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Kemudian Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

“Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah.”

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of The Child*. Oleh karena itu, sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang termaktub di dalam Konvensi Hak-hak Anak.

Berdasarkan Konvensi Hak-hak Anak 1989 (Resolusi PBB Nomor 44/25 tanggal 5 Desember 1989), hak-hak anak secara umum dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak-hak anak yaitu:

“Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*), hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*), hak untuk perlindungan (*the right to protection*), dan hak untuk partisipasi (*the right to participation*).”

Hak-Hak Anak dalam Konvensi hak-hak Anak, sebagaimana dikemukakan oleh Dolly Singh, yaitu sebagai berikut:³⁰

a. The Right to Survival

The survival right include provision of adequate food, shelter; clean water and primary health care. These are the basic right to ensure the survival of a child.

b. The Right to Develop

Development right include acces to information, education. culture activities, opportunities for rest, play and leisure, and the right to freedom of thought, conscienceand religion.

c. The Right to Protection

³⁰ Dolly Singh (ed.), *Child Rights and Social Wrongs An Analysis of Contemporary Realities, Volume 3 Child as a Global Citizen: A Third World Perspective*, Kanishka Publishers, Distributors, New Delhi, 2001, hlm. 21-22.

The child must be assured of protection not only from the violation of the above rights, but also from all kinds of exploitation and cruelty, arbitrary separation from the family, and abuse in the justice and penal systems. Protection is also vital for especially vulnerable groups among children like abandoned children, street children, handicapped children, abused children, displaced children, etc. Children must also be protected against use and sale of drugs, as well as in time of armed conflicts.

d. The Right to Participation

Participation right include the right to express opinions and to have these opinions taken into account in matters affecting the "child" own life, and the right to play an active role in the community and society through freedom of associations, etc.

Pasal 7,8, 9,19,20, 21, 23, 26, 27, 30, 32, 33, 34, 35, dan Pasal 38

Konvensi Hak-Hak Anak 1989 mengatur tentang Hak kelangsungan hidup (*survival rights*). Mengenai isi pasal-pasal di atas, yang mengatur Hak-Hak Anak, antara lain tentang:³¹

- 1) Hak anak untuk mendapatkan nama dan kewarganegaraan semenjak dilahirkan;
- 2) Hak anak untuk hidup bersama orang tuanya, kecuali kalau hal ini dianggap tidak sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- 3) Kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari segala bentuk salah perlakuan (*abuse*);
- 4) Hak anak-anak penyandang cacat (*disabled*) untuk memperoleh pengasuhan, pendidikan dan latihan khusus;
- 5) Hak anak untuk menikmati standar kehidupan yang memadai. Dan tanggung jawab utama orang tua. Kewajiban negara untuk memenuhinya;
- 6) Hak anak atas pendidikan dan kewajiban negara untuk menjamin agar pendidikan dasar disediakan secara cuma-cuma dan berlaku wajib;
- 7) Hak anak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat bius dan narkotika;
- 8) Hak anak atas perlindungan eksploitasi dan penganiayaan seksual, termasuk prostitusi dan keterlibatan dalam pornografi;

³¹ *Ibid*, hlm. 37-39

- 9) Kewajiban negara untuk menjajagi segala upaya guna mencegah penjualan, penyelundupan. Dan penculikan anak.”

Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak memuat Prinsip-Prinsip Dasar

Perlindungan Hukum Pidana terhadap Anak, di antaranya:

1. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
2. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
3. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang;
4. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek;
5. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; dan
6. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Hak terhadap perlindungan (*protection rights*) dalam Konvensi

Hak-Hak Anak, terdiri dari 3 (tiga) kategori, yaitu:³²

- 1) Adanya larangan diskriminasi anak, yaitu: Non diskriminasi terhadap hak-hak anak; hak mendapatkan nama dan kewarganegaraan; hak anak penyandang cacat;
- 2) Larangan eksploitasi anak, misalnya: Hak berkumpul dengan keluarganya; pencegahan penculikan; kewajiban negara untuk melindungi anak dari segala bentuk salah perlakuan oleh orang tua atau orang lain; perlindungan bagi anak yatim; kewajiban negara untuk melindungi anak-anak dari keterlibatan dalam pekerjaan yang mengancam kesehatan, pendidikan dan atau perkembangan anak; larangan penyiksaan,

³² Marlina, *Op.cit*, hlm.23-24

- perlakuan atau hukuman yang kejam, pidana mati, seumur hidup dan penahanan semena-mena;
- 3) Kondisi Krisis dan keadaan darurat anak, yaitu: Mengembalikan anak dalam kesatuan keluarga; perlindungan anak pengungsian; kondisi konflik bersenjata/perang dan perawatan rehabilitasi.

Hak untuk tumbuh kembang (*development rights*) pada intinya terdapat hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk pendidikan. dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup anak secara memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak (*the rights of standart of living*). Beberapa hak-hak untuk tumbuh kembang, seperti:³³

- 1) Hak untuk memperoleh informasi (*the right to information*);
- 2) Hak memperoleh pendidikan (*the right to education*);
- 3) Hak bermain dan rekreasi (*the right to play and recreation*);
- 4) Hak berpartisipasi dalam kegiatan budaya (*the right to participation in cultural activities*);
- 5) Hak untuk kebebasan berpikir (*conscience*), dan beragama (*the rights to thought and religion*);
- 6) Hak untuk pengembangan kepribadian (*the rights to personality development*);
- 7) Hak untuk memperoleh identitas (*the rights to identity*);
- 8) Hak memperoleh kesehatan dan fisik (*the rights to health and physical development*);
- 9) Hak untuk didengar pendapatnya (*the rights to be heard*);
- 10) Hak untuk/atas keluarga (*the right to family*).

Hak untuk berpartisipasi (*The right to participation*) merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak-kanak dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

³³ Marlina, *Loc.cit*, hlm. 24-25

Hak ini memberi makna bahwa anak-anak ikut memberikan sumbang peran. Beberapa hak atas partisipasi di dalam Konvensi Hak-hak Anak, seperti:³⁴

- 1) Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya;
- 2) Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk berekspresi;
- 3) Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung;
- 4) Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat;
- 5) Hak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak-hak Anak.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia pun menjelaskan terkait hak-hak seorang anak khususnya untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

³⁴ *Ibid*, hlm. 25

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Anak yang sedang menjalani masa pidana berhak:

- a. Mendapat pengurangan masa pidana;
- b. Memperoleh asimilasi;
- c. Memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. Memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. Memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. Memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak-Hak Anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal

4 sampai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Tentang Perlindungan Anak Perlindungan Anak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- 2) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status kewargahegaraan;
- 3) Setiap anak berhak beribadah menurut agamanya, berpikir sesuai dengan tingkat kecerdasan dan dalam bimbingan orang tuanya;
- 4) Setiap berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, atau oleh orang lain bila orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak.
- 5) Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
- 6) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Bagi anak cacat berhak pendidikan luar biasa, dan bagi anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya sesuai demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 9) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya.
- 10) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 11) Setiap anak selama pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: diskriminasi, eksploitasi, penyalahgunaan, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan, perlakuan salah lainnya.
- 12) Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari: penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, pelibatan dalam peperangan.

- 13) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukum yang tidak manusiawi;
- 14) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk: mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa; memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya.
- 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di antaranya:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasional;
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;

- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

4. Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Seorang delinkuen atau anak yang berkonflik dengan hukum sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Salah satu cara melindungi generasi bangsa yaitu melalui perwujudan perlindungan hukumnya. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku.

Anthony M Platt mengemukakan alasan pentingnya memberikan perlindungan hukum untuk anak, yaitu:³⁵

“Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.”

Selanjutnya Anthony M. Platt pun menjelaskan prinsip dari perlindungan terhadap anak, yang diantaranya:³⁶

1. Anak harus dipisahkan dari pengaruh kerusakan dari penjahat dewasa;
2. Anak nakal harus dijauhkan dari lingkungannya yang kurang baik dan diberi perlindungan yang baik. Anak harus dijaga dengan paduan cinta dan bimbingan;
3. Perbuatan anak nakal harus diupayakan untuk tidak dihukum, walaupun dihukum harus dengan ancaman hukuman yang minimal dan bahkan penyidikan tidak diperlukan karena terhadap anak harus diperbaiki bukan dihukum;
4. Terhadap anak nakal tidak ditentukan hukuman baginya, karena menjadi narapidana akan membuat perjalanan hidupnya sebagai mantan orang hukuman;
5. Hukuman terhadap anak hanya dijalankan jika tidak ada lagi cara lain yang lebih baik dijalankan;

³⁵ Anthony M Platt, *Op.cit*, hlm. 8

³⁶ *Ibid*, hlm. 23

6. Penjara terhadap anak dihindarkan dari bentuk penderitaan fisik yang buruk;
7. Program perbaikan yang dilakukan lebih bersifat keagamaan, pendidikan, pekerjaan, tidak melebihi pendidikan dasar;
8. Terhadap narapidana anak diberi pengajaran yang lebih baik menguntungkan dan terarah pada keadaan dunia luar.”

Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dimuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak, diantaranya:

- a. Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat;
- b. Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- c. Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang;
- d. Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat atau pendek;
- e. Setiap anak yang dirampas kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; dan
- f. Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Secara nasional perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diatur dalam Perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

”Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar dan mendapatkan perlindungan dari lingkungan hidup yang membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.
- b. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan atau masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, antara lain menentukan bahwa:

- a. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, jaksa bertindak berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- b. Jaksa harus jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela, tidak menerima secara langsung atau tidak langsung sesuatu pemberian dari siapa pun.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, memuat beberapa perlindungan terhadap orang-orang yang berkonflik, antara lain yaitu:

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan manabat kemanusiaannya di depan hukum.
- d. Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- e. Setiap orang yang termasuk kelompok yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.
- f. Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili dengan proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.
- g. Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- h. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan memperoleh pemenuhan kebutuhan untuk pengembangan pribadi sesuai dengan usianya kecuali demi kepentingannya.
- i. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum.
- j. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan. Pengadilan anak dilaksanakan secara objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup.

Bagi anak yang terlanjur berhadapan dengan hukum tentu akan menghadapi suatu sistem peradilan pidana anak (*juvenile justice system*) sebagai upaya untuk menegakkan hukum sebagai jaminan

kepastian hukum. Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Terkait upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sistem peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas. Sistem peradilan pidana anak tidak hanya dimaknai sebagai penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi juga dimaknai mencakup akar permasalahan (*root causes*) mengapa anak melakukan perbuatan pidana dan upaya pencegahannya.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Pelindungan;
- b. Keadilan;
- c. Nondiskriminasi;
- d. Kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. Penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. Pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. Proporsional;
- i. Perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. Penghindaran pembalasan.”

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa:

“Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, diantaranya:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. emberlakukan kegiatan rekreasional;
- e. embebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan martabat dan derajatnya;
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan/atau pidana seumur hidup;
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Pemberian keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Penghindaran dari publikasi atas identitasnya;
- j. Pemberian pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksesibilitas, terutama bagi Anak Penyandang Disabilitas;
- n. Pemberian pendidikan;
- o. Pemberian pelayanan kesehatan; dan
- p. Pemberian hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pertanggungjawaban Pidana Anak

Menurut Roeslan Saleh dipidana atau tidaknya seseorang yang melakukan perbuatan pidana tergantung apakah pada saat melakukan perbuatan ada kesalahan atau tidak, dan ia pun menjelaskan hal lainnya bahwa:³⁷

“Apabila seseorang yang melakukan perbuatan pidana itu memang punya kesalahan maka tentu ia dapat dikenakan sanksi pidana, akan tetapi bila ia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela, tetapi tidak mempunyai kesalahan ia tentu tidak dipidana.”

Moeljatno dan Roeslan Saleh mengenai asas kesalahan keduanya memisahkan perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana yang kemudian disebut ajaran dualisme. Ajaran dualisme memandang bahwa untuk menjatuhkan pidana ada dua tahap yang perlu dilakukan, yaitu:³⁸

1. Hakim harus menanyakan, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh aturan

³⁷ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 75

³⁸ *Ibid*, hlm. 89

- undang-undang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar aturan ini;
2. Apakah pertanyaan di atas menghasilkan suatu kesimpulan bahwa memang terdakwa telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan undang-undang, maka ditanyakan Iebih lanjut, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atau tidak mengenai perbuatan itu.

Syarat pertanggungjawaban pidana yaitu dimana pelaku harus mampu bertanggung jawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Untuk itu perlu kita ketahui bersama kapan seseorang itu dikatakan mampu bertanggung jawab dan apa yang menjadi tolak ukur untuk menyatakan adanya kemampuan bertanggungjawab itu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menentukan mengenai kemampuan bertanggung jawab. Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa:

”Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit”.

Berdasarkan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Maka Moeljatno menyimpulkan bahwa:³⁹

“Untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum, dan kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi. Syarat pertama faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak; Syarat yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak yaitu

³⁹ Marlina, *Op.cit*, hlm. 72

dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang tidak mampu menentukan kehendaknya, menurut kehendaknya, menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tubuhnya.”

Selanjutnya mengenai kesengajaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*criminee wetboek*) tahun 1809 dicantumkan bahwa:

“Sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.

Beberapa sarjana merumuskan *de will* sebagai keinginan, kemauan, kehendak dan perbuatan merupakan pelaksanaan dari kehendak. *De will* (kehendak) dapat ditujukan terhadap perbuatan yang dilarang dan akibat yang dilarang.

Sudarto menyatakan bahwa:⁴⁰

“Terdapat dua teori yang berkaitan dengan pengertian ”sengaja” yaitu Teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan.”

Menurut teori kehendak dan teori pengetahuan atau membayangkan, dijelaskan pengertian sengaja ialah:⁴¹

“Sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang, sedangkan menurut teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat karena manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan adanya suatu akibat. Adanya ”sengaja” apabila suatu akibat yang ditimbulkan karena suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud tindakan itu dan

⁴⁰ Sudarto, *Hukum Pidana I*, Cetakan ke-2, Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum UNDIP, 1990, hlm. 102-105, lihat juga Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 282-284

⁴¹ Marlina, *Op.cit*, hlm. 71

karena itu tindakan yang bersangkutan dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih dahulu telah dibuat.

Kedua teori Moeljatno tersebut lebih cenderung kepada teori pengetahuan atau membayangkan, alasannya adalah:⁴²

“Karena dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan. Sebab untuk menghendaki sesuatu, orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Tapi apa yang diketahui seseorang belum tentu juga dikehendaki olehnya. Lagi pula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan perbuatannya. Konsekuensinya ialah, bahwa untuk menentukan sesuatu perbuatan yang dikehendaki oleh terdakwa, (1) harus dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan bertujuan yang hendak dicapai, (2) antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin terdakwa.”

Secara umum ilmu hukum pidana membedakan 3 (tiga) macam kesengajaan, yaitu:⁴³

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsoogmerk*) adalah suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Menurut Lonkers kesengajaan ini merupakan bentuk yang paling murni dan sederhana.
2. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yakni seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana, menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
3. Kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana. Kesengajaan ini dikenal pula dengan sebutan *voorwardelijk opzet* atau *dolus eventualis*.

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 172-173

⁴³ Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Cetakan Pertama, Prandya Paramita, Jakarta, 1996, hlm. 89

Dengan terpenuhinya syarat adanya pertanggungjawaban pidana seorang anak, hal ini berarti bahwa terhadap anak tersebut dapat dikenakan pemidanaan. Pemidanaan terhadap anak hendaknya harus memperhatikan perkembangan seorang anak, hal ini disebabkan bahwa anak tidak dapat / kurang berpikir dan kurangnya pertimbangan atas perbuatan yang dilakukannya. Di samping itu, anak yang melakukan perbuatan pidana tidak mempunyai motif pidana dalam melakukan tindakannya yang sangat berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana karena memang ada motif pidananya.

Terdapat 3 (tiga) tahap peradilan anak, antara lain:⁴⁴

- 1) Tahap pertama mencakup pencegahan anak dari tindak pidana meliputi implementasi tujuan kebijakan sosial yang memungkinkan anak dalam pertumbuhannya sesuai dengan kepentingan terbaiknya;
- 2) Tahap kedua ditandai dengan anak yang bersentuhan dengan prosedur formal sistem peradilan pidana. Tahap ini merupakan bentuk tanggung jawab anak melalui proses peradilan pidana; dan
- 3) Tahap ketiga, resosialisasi diawali dari proses isolasi di lembaga pemasyarakatan sampai pembebasan anak.

Pada dasarnya terdapat 4 (empat) cakupan komponen dari sistem peradilan pidana, meliputi:⁴⁵

- 1) Substansi hukum pidana (*substantive criminal law (law of crimes)*) yang berfokus pada penentuan jenis tindakan yang dikualifikasi sebagai tindakan salah atau ilegal;

⁴⁴ Barbara Henkes, *The Role of Education in Juvenile Justice in Eastern Europe and The Former Soviet Union*, Constitutional & Legal Policy Institute, Hungary, 2000

⁴⁵ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, *STUDI META PENERAPAN: Restorative Justice Pada Tindak Pidana Anak*, Badan Penerbit Balitbangkumham, Jakarta, 2016, hlm. 13 . Lihat juga: Gerry Maher, *Age and Criminal Responsibility*, Ohio State Journal of Criminal Law, Vol 2, 493

- 2) Tanggung jawab pidana (*criminal responsibility*) yang berfokus pada penentuan kriteria untuk menetapkan seseorang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya dan dapat memikul sanksi atas tindak pidana tersebut. Penetapan ini berdasarkan elemen mental atau kapasitas untuk melakukan tindak pidana;
- 3) Proses tindak pidana (*criminal process*), yang berfokus pada metode yang dipergunakan untuk menentukan aturan hukum pidana yang dilanggar dan mengidentifikasi seseorang dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya;
- 4) Hukuman pidana (*sentencing*), yang berfokus pada hukuman yang harus ditanggung akibat tindak pidana yang dilakukan seseorang dan jenis-jenis hukuman pidana yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Haruslah mempertimbangkan perkembangan dan kepentingan terbaik anak di masa yang akan datang dalam pemberian pertanggungjawaban pidana terhadap anak. Karena kita tahu bahwa Anak adalah generasi penerus bangsa dan cita-cita negara, maka apabila terdapat penanganan yang salah menyebabkan rusak bahkan musnahnya bangsa di masa depan.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus telah mengatur mengenai sanksi terhadap Anak yang ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak. Bagian Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

“Bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada Anak dan demi perlindungan terhadap Anak, perkara Anak yang berkonflik dengan hukum dan Anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di pengadilan pidana Anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak.

Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*). Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ini mengatur mengenai keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Pasal 5 ayat (1) , (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan Pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana

atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

- (3) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi.

Pembahasan mengenai pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan pembahasan mengenai tindak pidana. Seseorang tidak akan mungkin dimintai sebuah pertanggungjawaban apabila ia tidak melakukan tindak pidana.

Mengenai pengertian Tindak Pidana itu sendiri apabila kita perhatikan Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang (UU) pidana yang dibentuk oleh pemerintah tidak ditemukan mengenai definisi tentang tindak pidana (delik) dan penanggungjawaban pidana. Padahal definisi tindak pidana sangatlah penting untuk dipahami agar dapat diketahui unsur-unsur apakah yang terdapat di dalamnya.

Selanjutnya unsur-unsur tindak pidana tersebut menjadi parameter atau tolak ukur dalam menentukan apakah perbuatan seseorang itu dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau tidak. Oleh karena tidak adanya definisi dan unsur-unsur perbuatan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan juga Undang-Undang (UU), maka para ahli hukum memberikan definisi dan unsur-unsur dari tindak pidana (delik).

Simons seorang guru besar ilmu hukum pidana di Universitas Utrecht berpendapat bahwa ”*strafbaar feit*” (peristiwa pidana) ialah:⁴⁶

“Perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.”

Kesalahan yang dimaksud oleh Simons dalam hal ini yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Uraian yang dikemukakan Simons terdapat pencampuran unsur-unsur tindak pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan dan sifat melawan hukum dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) yang mencakup kesengajaan, kealpaan serta kelalaian, dan kemampuan bertanggung jawab.

Berdasarkan definisi yang diutarakan oleh Simons tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana (delik) terdiri dari:⁴⁷

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- 2) Diancam dengan pidana;
- 3) Melawan hukum;
- 4) Dilakukan dengan kesalahan;
- 5) Orang yang melakukan mampu bertanggung jawab.

Selain itu kita perlu tahu bahwa salah satu unsur dari perbuatan pidana yaitu unsur sifat melawan hukum. Unsur ini merupakan suatu penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat.

⁴⁶ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995, hlm. 224

⁴⁷ Marlina, *Op.cit*, hlm. 75

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tentang ketentuan sifat melawan hukum. Terdapat tiga klasifikasi, diantaranya:

“**Pertama**, ada Pasal dan ketentuan yang dalam rumusannya mencantumkan kata ”melawan hukum”. **Kedua**, ada Pasal dan ketentuan yang dalam rumusannya mencantumkan kata ”melawan undang-undang”. **Ketiga**, ada juga yang dalam rumusannya tidak mencantumkan kedua kata tersebut.”

Menurut pembentuk undang-undang ada 2 (dua) alasan mengapa para pembentuk Undang-Undang tidak mencantumkan kata melawan hukum atau melawan undang-undang dalam setiap Pasal KUHP atau Undang-Undang (UU). Kedua alasan tersebut yaitu:

- 1) Bilamana dari rumus undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dinyatakan secara eksplisit;
- 2) Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar atau bertentangan dengan kaidah materiil yang berlaku baginya. Oleh karena itu, dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak melakukan perbuatan pidana adalah *onzinnig*, tidak masuk akal, sifat melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.

Perlu kita ketahui bersama bahwa pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah menetapkan sanksi bagi anak yang terbukti melakukan tindak pidana berupa pidana atau tindakan. Di dalam Undang-Undang ini diatur bahwa usia anak yang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu 14 (empat

belas) tahun, sehingga anak yang berumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dijatuhi sanksi tindakan, sedangkan anak yang sudah berumur 14 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana atau tindakan.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

- (1) Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 1. Pembinaan di luar lembaga;
 2. Pelayanan masyarakat; atau
 3. Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga; dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak.

Dilanjut dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan:

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi:
 - a. Pengembalian kepada orang tua/Wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di LPKS;
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.

- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

B. Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

1. Pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Sistem Peradilan Pidana Anak menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) melalui sistem diversifikasi. Para penegak hukum wajib menggunakan sistem diversifikasi (Penyelesaian melalui jalur non formal) terhadap seluruh tahap proses hukum (*due process of law*). Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa:

“Proses Diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan Anak dan orang tua/Walinya, korban dan/atau orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif.”

Diversifikasi yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah diversifikasi yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif.

Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan tentang pengertian Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) bahwa:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Pengertian lainnya yaitu datang dari Eva Achjani Zulfa seorang pakar hukum pidana dalam hal keadilan restoratif yang menjelaskan bahwa:⁴⁸

“Teori keadilan restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem hukum pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan dari masyarakat dan korban yang merasa disisihkan dengan hukum pidana yang ada sekarang ini.”

Dapat kita pahami bersama bahwa Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) ialah proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan cara melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi demi mencapai kesepakatan dan penyelesaian.

Kemudian definisi Keadilan Restoratif menurut *Black's Law Dictionary*, yaitu:⁴⁹

“An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's needs, and

⁴⁸ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif di Indonesia : Studi Tentang Kemungkinan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana*, Disertasi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 132

⁴⁹ *Black's Law Dictionary*, 8th ed. (St. Paul, MN: West Thomson, 2004) s.v. “*Restorative Justice*”.

holding the offender responsible for his or her actions Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders. (Sanksi pidana alternatif yang berfokus pada memperbaiki kerusakan yang telah dilakukan, memenuhi kebutuhan korban, dan membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Sanksi keadilan restoratif menggunakan pendekatan yang seimbang, membuat pelaku bertanggung jawab atas tindakannya, dan memberikan bantuan kepada korban. Pelaku dapat diperintahkan untuk membuat restitusi, melakukan pelayanan masyarakat, atau menebus kesalahannya dalam beberapa cara lain yang diperintahkan oleh pengadilan).”

Selain itu Dignan mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai:⁵⁰

"Restorative Justice is a new framework for responding to wrong doing and conflict that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and counseling professional and community groups. Restorative Justice is a valued-based approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person harmed, the person causing the harm, and the affected community. (Sebuah kerangka kerja baru untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang dengan cepat mendapatkan penerimaan dan dukungan dari pendidikan, hukum, sosial, dan konseling profesional juga kelompok masyarakat. Keadilan restoratif adalah pendekatan untuk menanggapi kesalahan dan konflik yang fokus pada orang yang dirugikan, orang yang menyebabkan kerugian, dan masyarakat yang terkena dampak atas kerugian tersebut)”.

Tony F. Marshall yang merupakan seorang ahli kriminologi Inggris dalam tulisannya yang berjudul “*Restorative Justice an Overview*” mengatakan:⁵¹

“Restorative justice ialah suatu tahap dimana para pihak yang memiliki kepentingan dengan tindak pidana tertentu

⁵⁰ Eva Achjani Zulfa, *Op.cit*, Disertasi, hlm. 132

⁵¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Refika Editama, Bandung, 2009, hlm. 88

melakukan pertemuan untuk bersama-sama melakukan tindakan penyelesaian dan memecahkan masalah, dan bagaimana menangani akibat atas suatu pelanggaran demi implikasinya di masa depan.”

Dilanjut oleh John Braithwaite yang juga mendefinisikan keadilan restoratif (*Restorative Justice*) sebagai:⁵²

"Restorative justice is a process where all the stakeholders affected by an injustice have an opportunity to discuss how they have been affected by the injustice and to decide what should be done to repair the harm. (Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana pihak-pihak yang terkait dalam suatu ketidakadilan untuk berdiskusi tentang bagaimana mereka mengalami ketidakadilan dan memutuskan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kerugiannya)

United Nations Children Fund (UNICEF) memiliki konsep Restorative Justice, yakni:⁵³

“Konsep Restorative Justice menitikberatkan pada keadilan yang memulihkan, yakni dapat memulihkan pelaku tindak pidana anak, korban, dan masyarakat yang merasa terganggu akibat adanya tindak pidana anak tersebut.”

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, tidaklah mudah untuk menentukan definisi yang paling tepat untuk menggambarkan arti dari keadilan restoratif karena sesungguhnya terdapat banyak sekali definisi bagi pendekatan ini, mengingat begitu banyaknya bentuk yang berkembang di seluruh dunia dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif.

⁵² John Braithwaite, *Restorative Justice & Responsive Regulation*, Oxford University Press, Oxford, 2002

⁵³ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 113

Dengan demikian, maka substansi dari keadilan restoratif atau *Restoratif Justice* ialah:⁵⁴

“Pemberdayaan (*Empowerment*) yang merupakan jantung dan penentu keberhasilan dari keadilan restoratif. Yang mempertemukan pelaku bersama korban dan masyarakat dengan tujuan membahas sekaligus secara aktif berpartisipasi di penyelesaian perkara pidana (*resolution of criminal metter*).”

Definisi yang penulis gunakan dalam penelitian kali ini yaitu definisi keadilan restoratif atau *restorative justice* yang tercantum dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain itu perkembangan mengenai pendekatan keadilan restoratif yang terjadi sekarang ini tidak terlepas dari faktor sejarah dimana pemikiran keadilan restoratif dikenalkan dalam sistem hukum negara-negara di dunia. Untuk itu, penulis akan menjelaskan mengenai sejarah perkembangan teori keadilan restoratif yang merupakan konsep hukum pidana yang dianggap memenuhi rasa keadilan secara menyeluruh.

2. Sejarah Perkembangan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Ketidakpuasan dan rasa frustrasi terhadap hukum pidana formal di banyak negara di dunia telah memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi di negara tersebut. Sistem hukum yang ada dianggap tidak lagi dapat memberikan

⁵⁴ Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Op.cit*, hlm. 7

perlindungan terhadap hak asasi manusia serta transparansi terhadap kepentingan umum yang dijagapun semakin tidak dirasakan. Hal ini dibuktikan dengan adanya permasalahan seputar perkembangan sistem peradilan pidana yang ada saat ini.

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelenggarakan sebuah kongres yang dikenal dengan nama "*Congress on Crime Prevention and The Treatment of Offenders*". Kongres ini diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Kongres ini bertujuan untuk membicarakan dan mendiskusikan tentang perkembangan kejahatan, penanggulangannya, dan penanganan pelaku kejahatan serta berbagai topik terkait. Dalam kongres tersebut dibuka kesempatan bagi sejumlah negara untuk berbagai pengalaman atas sejumlah program yang dikembangkan termasuk juga berbagai permasalahan yang muncul dalam penyelenggaraannya.

Melalui kongres ini diketahui bahwa:⁵⁵

“Sejumlah negara juga mempergunakan kesempatan ini untuk mengadakan kerja sama dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terutama dalam kejahatan yang dilakukan secara lintas negara.”

Pada kongres yang diselenggarakan di tahun 1990 dan 1995, beberapa lembaga swadaya masyarakat dari beberapa negara mensponsori sejumlah sesi pertemuan untuk secara khusus mendiskusikan tentang keadilan restoratif. Sejak itu, berbagai minat dan program serta kebijakan dengan menggunakan pendekatan ini

⁵⁵ Eva Achjani Zulfa, Disertasi, *Op.cit*, hlm. 131

dilakukan diberbagai negara dan menjadi topik yang mengemuka. Pada Tahun 1995 itu pula, dalam sejumlah sesi pertemuan di kongres yang dilaksanakan di Kairo ini, dibicarakan secara tajam dan mendalam hal-hal yang teknis berkaitan dengan penggunaan pendekatan keadilan restoratif dalam penanganan perkara pidana.

Hingga pada kongres selanjutnya yang digelar pada tahun 2000 dihasilkan:⁵⁶

“United Nation, Basic Principles On The Use Of Restoratif Justice Programmes In Criminal Matters yang berisi sejumlah prinsip-prinsip mendasar dari penggunaan pendekatan keadilan restoratif.”

“Restorative Justice” merupakan suatu model pendekatan yang muncul dalam era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Terlepas dari kenyataan bahwa pendekatan ini masih diperdebatkan secara teoretis, pandangan ini pada kenyataannya berkembang dan banyak mempengaruhi kebijakan hukum dan praktik di berbagai negara.

Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui *Basic Principles* yang telah

⁵⁶ *Ibid.*

digariskannya menilai bahwa pendekatan Keadilan Restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai dalam sistem peradilan pidana yang rasional.

Hal ini sejalan dengan pandangan G. P. Hoefnagels yang menyatakan bahwa:⁵⁷

“Politik kriminal harus rasional (*a rational total of the responses to crime*). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.”

Tentang konsepsi keadilan restoratif sebenarnya bukan hal yang baru atau asing bagi masyarakat Indonesia karena selama ini masyarakat Indonesia dengan warisan keanekaragaman adat/budaya (kearifan lokal) yang telah mempunyai mekanisme bermasyarakat dan penyelesaian masalah yang mampu diandalkan untuk menangani anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang melakukan tindakan-tindakan melanggar norma ataupun diduga melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pergeseran pemikiran dari model penghukuman tradisional adalah dengan adanya model penghukuman yang memberikan keadilan, terutama keadilan yang diarahkan pada keadilan masyarakat. Hal ini merupakan suatu titik awal/dasar lahirnya keadilan restoratif di negara manapun.

Adanya pergeseran pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa dalam sistem peradilan pidana telah terjadi suatu upaya untuk

⁵⁷ *Ibid.*

memberikan perhatian dan pemahaman terhadap penyelesaian kasus tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan tercapainya keadilan untuk semua pihak yang terkait dalam tindak pidana Pendekatan Keadilan Restoratif adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, pendekatan keadilan juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif, makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan. Akan tetapi dalam pendekatan keadilan restoratif, yang menerima dampak langsung beserta kerugian adalah korban atas terjadinya suatu tindak pidana bukanlah negara, sebagaimana dalam sistem peradilan pidana yang sekarang ada.

Oleh karenanya, kejahatan menciptakan kewajiban untuk membenahi rusaknya hubungan akibat terjadinya suatu tindak pidana. Sementara keadilan dimaknai sebagai proses pencarian pemecahan masalah yang terjadi atas suatu perkara pidana dimana keterlibatan

korban, masyarakat dan pelaku menjadi penting dalam usaha perbaikan, rekonsiliasi, dan penjaminan keberlangsungan usaha perbaikan tersebut.

3. Konsep Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Mengenai konsep keadilan restoratif John Braithwaite mengemukakan bahwa:⁵⁸

“Keadilan restoratif sebuah arah baru antara "justice" dan "welfare model", kemudian antara "retribution" dan "rehabilitation".

Kelompok kerja peradilan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan keadilan restoratif sebagai suatu proses dimana semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu untuk duduk bersama dan memecahkan masalah serta memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang datang.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversi, yaitu pengalihan dari proses pengadilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru bagi Indonesia, bahkan dalam hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

Hal inilah mengapa pendekatan keadilan restoratif perlu dijadikan landasan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu bagi anak yang

⁵⁸ Elfina Sahetapi, *Restorative Justice dalam wujud diversi: kasus anak yang berkonflik dengan hukum*. Hlm. 11

berhadapan dengan Pendekatan keadilan hukum. Dengan menggunakan metode pendekatan keadilan restoratif, hasil yang diharapkan ialah berkurangnya jumlah anak-anak yang ditangkap, ditahan, dan divonis penjara serta menghapuskan stigma dan mengembalikan anak menjadi manusia normal yang diharapkan dapat berguna kelak.

Model pendekatan keadilan restoratif juga berlandaskan dengan *due process model*, bekerjanya sistem peradilan pidana, yang sangat menghormati hak-hak hukum setiap tersangka seperti hak untuk diduga dan diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah jika pengadilan belum memvonisnya bersalah, hak untuk membela diri dan hak untuk mendapatkan hukuman yang proporsional dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Dalam kasus pelanggaran hukum yang pelakunya adalah anak, mereka berhak mendapatkan pendampingan dari pengacara selama menjalani proses peradilan. Disamping itu, adanya kepentingan korban yang juga tidak boleh diabaikan namun tetap harus memperhatikan hak asasi anak sebagai tersangka. Oleh karena itu, anak-anak sebisa mungkin harus dijauhkan dari tindakan penghukuman sebagaimana yang biasa diterapkan kepada pelaku dewasa.

Selain itu sudah kita ketahui bersama bahwa persoalan pelaku tindak pidana anak, bukan hanya persoalan di Indonesia saja, tetapi merupakan masalah dunia. Dalam kehidupan masyarakat di berbagai penjuru dunia, terdapat perilaku anak yang dianggap menyimpang oleh masyarakat di sekitarnya. Sehubungan dengan hal itu *United Nations*

Children Fund (UNICEF) mengembangkan konsep keadilan restoratif (*Restorative justice*) untuk melindungi pelaku tindak pidana anak.

Konsep *Restorative justice* atau Keadilan Pemulihan dari UNICEF didasarkan pada instrumen-instrumen Hukum Internasional bagi anak yang mempunyai raggalah hukum, yaitu:⁵⁹

- 1) Resolusi Majelis Umum PBB 40/33, tanggal 29 November 1985, mengenai "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of juvenile justice*" ("*The Beijing Rules*");
- 2) Resolusi Majelis Umum PBB 44/25, tanggal 20 November 1989, mengenai "*Convention on the Rights of the Child*" (Konvensi Hak-hak Anak);
- 3) Resolusi Majelis Umum PBB 45/112, tanggal 14 Desember 1990 mengenai "*United Nations Guidelines for the Prevention of juvenile Delinquency*" ("*The Riyadh Guidelines*");
- 4) Resolusi Majelis Umum PBB 45/113, tanggal 14 Desember 1990, mengenai "*United Nations Rules for the Protection of juvenile Deprived of their Liberty*".

Konsep *Restorative Justice* dari UNICEF menitikberatkan kepada keadaan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindak pidana tersebut.

Proses pemulihan menurut konsep *restorative justice* adalah melalui diversifikasi, yaitu pengalihan atau pemindahan dari proses peradilan ke dalam proses alternatif penyelesaian perkara yaitu melalui musyawarah pemulihan atau mediasi. Pengalihan dapat dilakukan atas dasar kewenangan diskresi dari penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan tingkat pemeriksaan melalui suatu penetapan.

⁵⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.cit*, hlm. 133

Apabila perkaranya tidak dapat diselesaikan secara mediasi Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengacu pada *due process of law*, sehingga Hak Asasi Anak yang diduga melakukan tindak pidana dan/atau telah terbukti melakukan tindak pidana dapat dilindungi.

Dengan menggunakan konsep *restorative justice* sebagaimana dikembangkan UNICEF, kiranya Peradilan Pidana Anak dapat diharapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:⁶⁰

- 1) Berkurangnya jumlah anak-anak yang dikenakan penahanan sementara dan divonis penjara;
- 2) Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari;
- 3) Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- 4) Mengurangi beban kerja pengadilan;
- 5) Menghemat keuangan negara;
- 6) Meningkatkan dukungan orang tua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak;
- 7) Pengintegrasian kembali anak ke dalam masyarakat.

C. Sistem Peradilan Pidana Anak Tingkat Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan awal dalam proses perkara pidana anak. Secara nasional pengertian penyidikan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 1 butir 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.”

⁶⁰ *Ibid.*

Tujuan Penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia ialah untuk mengumpulkan bukti guna menemukan apakah suatu peristiwa yang terjadi merupakan peristiwa pidana atau bukan. Dengan penyidikan juga ditujukan untuk menemukan pelaku atas suatu tindak pidana. Setelah adanya penyidikan tahapan selanjutnya dilakukan penyelidikan. Penyelidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Polisi dalam melakukan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Dalam pasal 1 butir 1 jo. Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.”

Penyidik yang berwenang dalam perkara pidana anak yaitu penyidik anak. Hal ini telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan agar penyelesaian perkara pidana anak mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan diupayakan Diversi.

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

- (1) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- (2) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
 - b. Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan
 - c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversi.”

Wewenang penyidik menurut Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana ialah:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan; mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut penjelasan Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP jo. Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan aturan hukum;
- b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan itu dilakukan;
- c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- e. Menghormati hak asasi manusia.

Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi:

“Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.”

Syarat-syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak;
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 berbunyi:

- (1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan;

- (2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya;
- (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan sosial dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Sebagaimana bunyi Pasal 32 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai berikut:

- (1) Penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana;
- (2) Penahanan terhadap Anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
 - b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.
- (3) Syarat penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan;
- (4) Selama Anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial Anak harus tetap dipenuhi.
- (5) Untuk melindungi keamanan Anak, dapat dilakukan penempatan Anak di LPSK.

2. Prosedur Penyidikan Yang Dilakukan Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana

Polisi dalam melakukan Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana harus memperhatikan berbagai ketentuan mengenai upaya penanganan anak mulai dari penangkapan sampai proses penempatan.

Berikut penjelasan prosedur yang dilakukan untuk anak pelaku tindak pidana, yaitu:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), mengatur terkait wewenang polisi dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan yang selanjutnya diatur dalam petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) kepolisian. Aturan tersebut menjadi pedoman bagi setiap anggota kepolisian Republik Indonesia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, di samping juklak dan juknis yang dimiliki, polisi juga memiliki "Buku saku untuk polisi". Dalam buku saku untuk polisi tersebut termuat panduan penanganan terhadap anak, seperti:⁶¹

a. Tindakan penangkapan diatur Pasal 16 sampai 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menjelaskan bahwa:

“Untuk kepentingan penyelidikan, penyidik atas perintah penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan.”

Sesuai dengan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup dengan menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali tertangkap tangan.”

⁶¹ Apong Herlina et al, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta, 2000

Kemudian Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa:

“Adapun waktu penangkapan paling lama satu hari.”

Perlindungan terhadap hak-hak anak tersangka pelaku tindak pidana diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sesuai dengan yang sudah penulis jelaskan dan uraikan sebelumnya.

- b. Khusus tindakan penangkapan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, polisi memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan terhadap anak, seperti:
1. Perlakukan anak dengan asas praduga tak bersalah;
 2. Perlakukan anak dengan arif, santun dan bijaksana, dan tidak seperti terhadap pelaku tindak pidana dewasa;
 3. Saat melakukan penangkapan segera memberitahukan orang tua dan walinya;
 4. Anak tertangkap tangan segera memberitahukan orang tua atau walinya;
 5. Wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, polisi atau masyarakat berdasar pada asas kewaiiban;
 6. Penangkapan terhadap anak yang diduga sebagai tersangka bukan karena tertangkap tangan, merupakan kontak atau tahap pertama pertemuan antara anak dengan polisi. Tahap ini penting bagi

seorang polisi menghindarkan anak dari pengalaman-pengalaman traumatik yang akan dibawanya seumur hidup. Untuk itu polisi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan surat perintah penangkapan legal kepada anak yang diduga sebagai tersangka dengan ramah dan bertanggung jawab. Cara yang ramah memberi rasa nyaman terhadap anak daripada rasa takut;
- 2) Menggunakan pakaian yang sederhana dan hindari penggunaan kendaraan yang bertanda/berciri khas polisi untuk menghindari tekanan mental anak akibat simbol-simbol polisi yang terkesan membahayakan dan mengancam diri anak;
- 3) Petugas yang melakukan penangkapan tidak boleh menggunakan kata-kata kasar dan bernada tinggi yang akan menarik perhatian orang-orang yang berada di sekeliling anak. Penggunaan kata-kata yang bersahabat akan mempermudah anak menjalani setiap prosesnya dengan tenang tanpa rasa takut dan tertekan;
- 4) Membawa anak dengan menggandeng tangannya untuk menciptakan rasa bersahabat, hindari perlakuan kasar dan menyakitkan seperti memegang kerah baju atau bahkan menyeret dengan kasar;
- 5) Petugas tidak memerintahkan anak melakukan hal-hal yang memermalukannya dan merendahkan harkat dan

martabatnya sebagai manusia, seperti menyuruh membuka pakaian. Akan tetapi memberikan perlindungan mental dan jiwa anak saat ditangkap;

- 6) Jika keadaan tidak memaksa dan membahayakan, polisi tidak perlu melakukan penangkapan dengan menggunakan borgol terhadap anak, karena perlakuan ini menyakitkan dan membuat trauma serta rasa malu dilihat masyarakat atau tetangganya;
- 7) Media massa tidak boleh melakukan peliputan proses penangkapan tersangka anak demi menjaga jati diri dan identitas anak;
- 8) Pemberian Pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan fisik dan psikis anak sesegera setelah penangkapan. Berkas pemeriksaan medis dan pengobatan anak menjadi bagian catatan kasus anak yang berhadapan dengan hukum;
- 9) Penangkapan yang dilakukan diinformasikan kepada orang tua/walinya dalam waktu tidak lebih dari 24 jam dan kesediaan orang tua/wali mendampingi anak dalam pemeriksaan di kantor polisi;
- 10) Pemberitahuan penangkapan anak tersangka kepada petugas Bapas di wilayah setempat atau pekerja sosial oleh polisi. Pemberitahuan dilakukan dalam waktu secepatnya tidak lebih dari 24 jam;

11) Polisi melakukan wawancara atau pemeriksaan di ruangan yang layak dan khusus untuk anak guna memberikan rasa nyaman kepada anak.

Tahap wawancara dan penyidikan polisi penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Wawancara terhadap anak tersangka pelaku tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya.

Sebagaimana yang termaktub Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak Korban atau Anak Saksi wajib didampingi oleh orang tua dan/atau orang yang dipercaya oleh Anak Korban dan/atau Anak Saksi, atau Pekerja Sosial.”

Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Bahasa yang dipergunakan polisi dalam wawancara dengan anak mudah dimengerti, baik oleh anak yang bersangkutan maupun pendampingnya, jika anak dan pendampingnya kesulitan dalam menggunakan bahasa resmi yaitu bahasa Indonesia, maka polisi harus menghadirkan penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan polisi dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Wawancara terhadap anak dilakukan pada

kesempatan pertama, di antara wawancara dengan pihak lain seperti pendamping atau orang yang hadir saat itu.

Untuk menjaga perasaan anak, polisi menghindari penekanan kebohongan, intimidasi atau pelakuan keras atau kasar terhadap anak selama wawancara berlangsung. Tempat wawancara dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan.

Teknik wawancara yang dilakukan seorang polisi terhadap pelaku anak pertama-tama polisi menginformasikan kepada orang tua atau wali anak sesegera sebelum wawancara dimulai, selanjutnya polisi juga menginformasikan bahwa anak berhak mendapatkan bantuan hukum dari pihak pengacara atau advokat. Polisi juga menyampaikan kepada anak dan orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi Oleh penasihat hukum dan pekerja sosial yang kompeten, dan bagaimana cara mengakses bantuan-bantuan tersebut.

Hal ini termaktub pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyatakan bahwa:

“Dalam setiap tingkat pemeriksaan, Anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

Selanjutnya polisi dalam pemeriksaan terhadap anak, memperlakukan anak dengan pertimbangan keterbatasan kemampuan ataupun verbal dibandingkan dengan orang dewasa bahkan

dibandingkan dengan diri polisi itu sendiri. Tindakan yang salah terhadap anak membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Oleh karena itu, polisi dalam melakukan pemeriksaan mengupayakan terciptanya suasana yang akrab di antara penyidik yang sedang mewawancarai dan anak yang sedang diperiksa.

Polisi berusaha tidak melakukan hal-hal yang membentuk tingkah laku anti sosial pada anak sehingga anak-anak putus asa menghadapi masalahnya yang menyebabkan rasa kehilangan masa depan. Justru sebaiknya penyidik dan pendamping memberikan motivasi guna membangun rasa percaya anak. Selain itu, upaya lain dalam membangun rasa percaya anak dengan sikap peka pada kebutuhan anak dan bemsaha mempermudah anak mendapatkan informasi.

Ada beberapa hal yang tidak boleh dilakukan Oleh seorang polisi dalam melakukan penyidikan terhadap anak, yaitu:⁶²

- a. Penyidik melakukan kekerasan dan tindakan tidak wajar terhadap anak. Hal ini dapat menimbulkan trauma pada anak;
- b. Memberi label buruk pada anak dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya memberikan label buruk pada anak, seperti 'pencuri', 'maling', 'pembongong', dan lain-lain;
- c. Penyidik kehilangan kesabaran sehingga menjadi emosi dalam melakukan wawancara terhadap anak;
- d. Penyidik tidak boleh menggunakan kekuatan badan atau fisik atau perlakuan kasar lainnya yang dapat menimbulkan rasa permusuhan pada anak;
- e. Membuat catatan atau mengetik setiap perkataan yang dikemukakan oleh anak pada saat penyidik melakukan wawancara dengan anak. Seharusnya petugas mencatat poin-poin penting dari hasil wawancara, setelah selesai baru dibuat catatan yang lengkap hasil wawancara

⁶² Marlina, *Op.cit*, hlm. 90

tersebut. Oleh karena itu, sebaiknya penyidik menggunakan alat perekam yang tersembunyi untuk membantu mengingatnya.

Dalam kasus yang tidak memerlukan tindak lanjut atau kasus ringan yang cukup mendapatkan peringatan (*cautioning*) saja, laporan harus dibuat dengan benar dan secepatnya, dan terpisah dengan laporan bagi kasus-kasus yang memerlukan tindak lanjut.

D. Balai Pemasyarakatan

1. Pengertian Balai Pemasyarakatan

Balai Pemasyarakatan (BAPAS) adalah salah satu pihak yang terlibat selama proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum dari awal anak ditangkap hingga anak menyelesaikan masa hukumannya. Hal ini membuat BAPAS memiliki peran yang penting dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum.

Nashriana dalam bukunya yang berjudul perlindungan hukum pidana bagi anak di Indonesia mengungkapkan bahwa:⁶³

“Secara umum peran BAPAS dalam proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap sebelum sidang pengadilan (*pra adjudikasi*) yakni penyidikan, tahap saat sidang pengadilan (*adjudikasi*) yakni pendampingan di persidangan dan tahap setelah pengadilan (*post adjudikasi*) yakni pengawasan dan pembimbingan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum.”

Pelaksanaan proses peradilan Anak yang berkonflik dengan hukum cenderung tidak sesuai dengan Undang-Undang atau hukum yang mengikat para institusi khususnya BAPAS. Hal ini terlihat dari

⁶³ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2012, hlm. 110-116

hasil pemantauan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2012 terhadap beberapa BAPAS yang ada di Indonesia.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia mendapatkan laporan bahwa:⁶⁴

“Terdapat beberapa penyimpangan seperti mayoritas anak tidak didampingi penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (BAPAS) selama proses di pengadilan, mayoritas putusan hakim pidana penjara, banyak hak anak yang terampas selama proses pengadilan, diantaranya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk berkreasi, dan anak jalanan yang menjadi Anak yang berkonflik dengan hukum seringkali ditahan karena tidak ada yang menjamin.”

Istilah Balai Pemasyarakatan (Bapas) dikenal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sebelumnya bernama Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa). Bapas adalah ranata untuk melaksanakan bimbingan klien pemasyarakatan. Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) dilakukan di lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan pembimbingan WBP dilakukan oleh Bapas.

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten dan kota.”

Menurut Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa:

“Pembimbingan oleh Bapas dilakukan terhadap:
a. Terpidana bersyarat;

⁶⁴ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op.cit*, hlm. 46

- b. Narapidana, Anak Pidana, Anak Negara yang mendapat pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas;
- c. Anak Negara yang berdasarkan putusan pengadilan, pembinaannya diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial;
- d. Anak Negara yang berdasarkan Keputusan Menteri atau Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang ditunjuk, bimbingan diserahkan kepada orang tua asuh atau badan sosial; dan
- e. Anak yang berdasarkan penetapan pengadilan, bimbingannya dikembalikan kepada orang tua atau walinya.”

Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menjelaskan bahwa pengertian Balai Pemasyarakatan (Bapas) ialah:

“Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Bapas adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan.”

Pasal 64 ayat (3) menjelaskan mengenai tugas Pembimbing Kemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diantaranya yaitu:

- a. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan Diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama proses Diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya kepada pengadilan apabila Diversi tidak dilaksanakan;
- b. membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara Anak, baik di dalam maupun di luar sidang, termasuk di dalam LPAS dan LPKA;
- c. menentukan program perawatan Anak di LPAS dan pembinaan Anak di LPKA;
- d. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan; dan
- e. melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak yang memperoleh asimilasi,

pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.

2. Sejarah Singkat Balai Pemasyarakatan

Sejarah kelembagaan Bapas pada hakekatnya tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Sahardjo pada tahun 1963 yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman. Beliau memperkenalkan konsep Pemasyarakatan dan selanjutnya membawa revolusi dalam sistem hukum di Indonesia terutama dalam sistem pemidanaan.

Salah satu laman Bapas menjelaskan bahwa:⁶⁵

“Kemudian hal tersebut ditindaklanjuti dengan diadakannya konferensi Dinas Kependidikan se-Indonesia di Lembang, Bandung pada tahun 1964 yang menghasilkan berubahnya sistem Kependidikan menjadi sistem Pemasyarakatan seiring dengan perubahan tersebut kemudian jawatan kependidikan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.”

Mengenai sejarah berdirinya Bapas sendiri, sebelumnya merupakan penjelmaan dari jawatan reklasering, mengingat hampir semua tugas-tugas yang dilaksanakan Bapas pada dasarnya adalah tugas yang dilaksanakan oleh reklasering. Keberadaan Bapas sebenarnya sudah ada sejak berdirinya Jawatan Reklasering yakni pada tanggal 5 Agustus 1927 berdasarkan *Staatsblad* 1926 No. 251 tentang Pelaksanaan Pidana Bersyarat dan Lepas Bersyarat, bahkan embrio reklasering bersamaan dengan terbitnya peraturan pelepasan dengan perjanjian yang berdasarkan pada *staatsblad* 1917 No. 749.

⁶⁵ <http://Bapaspusat.web.id/> diakses pada tanggal 15 Maret 2020

Dinas Reklassering ini berada dibawah Inspektorat Reklassering dan Pendidikan Paksa. Kemudian pada tanggal 9 September 1932 Jawatan Reklassering dan Pendidikan Paksa dihapus dan berubah menjadi Jawatan Kepenjaraan dibawah Departemen Kehakiman. Sejak itulah tugas dan fungsi Reklassering tersendat-sendat dan hampir hilang sama sekali.

Hal ini disebabkan semakin sulitnya tenaga yang tertarik dalam lapangan pekerjaan Reklassering dan sulitnya biaya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada tanggal 27 April 1964 diadakan Konferensi Dinas Kepenjaraan seluruh Indonesia di Lembang, Bandung yang akhirnya mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan dianut sampai saat ini disesuaikan dengan falsafah Pancasila.

Sehubungan dengan pembinaan terhadap narapidana anak, pembinaan tidak cukup hanya melalui Lembaga Pemasyarakatan saja, akan tetapi harus dilakukan juga di luar Lembaga Pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana anak diluar lembaga ini merupakan usaha yang modern, dimana metode pekerja sosial digunakan sebagai metode pembinaan. Guna menyesuaikan diri dengan sistem pemasyarakatan, maka sesuai dengan keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No. 5/4/Kep/I.01/1966 tentang Struktur Organisasi dan Tugas-tugas Departemen Kehakiman, lahirlah Direktorat Bimbingan Pemasyarakatan yang semula merupakan kesatuan dari Direktorat Pemasyarakatan dan kedua Direktorat ini

dikoordinasi oleh Direktur Jendral Pemasarakatan. Kemudian sejak berubahnya sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasarakatan, terjadi pula perubahan-perubahan yang mendasar dalam institusi yang ada.

Perubahan ini terutama terjadi dalam Direktorat Bina Tuna Warga menjadi Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan seiring itu pula jawatan reklasering berubah menjadi Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (Bispa) atau yang sekarang dikenal dengan nama Bapas sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I. No. M.01-PR.07.03 Tanggal 12 Februari 1997 yang ditindak lanjuti dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Tanggal 7 Maret 1997 nomor : E.PR.07.03-17 tentang perubahan nama/nomenklatur Balai Bispa menjadi Bapas.

Dengan demikian, Bapas merupakan unit pelaksana teknis dibidang pembinaan di luar lembaga pemasarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM. Pada saat ini pelaksanaan tugas Bapas berpedoman kepada Undang-Undang seperti KUHP dan segala peraturanyang berupa Surat Keputusan, Surat Edaran, dan peraturan-peraturan lainnya, seperti:⁶⁶

1. Landasan Idil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945
3. Landasan Operasional:
 - a. Undang undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
 - b. Undang Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak;

⁶⁶ Yusep Antonius, *Peranan Balai Pemasarakatan Dalam Penanganan Klien Pemasarakatan*, tesis, Program Studi Pengkajian Ketahanan Nasional, Program Pasca Sarjanan, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 43.

- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.02-PW.07 Tahun 1997 tentang Tata Tertib Persidangan dan Tata Tertib Ruang Sidang;
- e. Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M01-PK.04.10Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat Bagi Pembimbing Kemasyarakatan;
- f. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PR.07.03 Tahun 1997, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- g. Keputusan Menteri Kehakiman No. M02-PR.08.03 Tahun 1999 tentang Pembentukan Balai Pertimbangan Pemasarakatan dan Tim Pengamat Pemasarakatan;
- h. Surat Keputusan Presiden Kabinet Ampera tanggal 3 November 1966 No.75/U/Kep/11/66 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak;
- i. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. M.HH-OT.02.02 Tahun 2009, tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasarakatan.

Bapas sendiri dalam menjalankan fungsi dan peranannya mempunyai petugas teknis yang disebut dengan Pembimbing Kemasyarakatan (*Probation Officer*). Penggunaan istilah itu sendiri pertama kali digunakan oleh John Augustus, seorang tukang sepatu di daerah Boston, Amerika Serikat pada tahun 1841, dimana beliau sangat tertarik dengan hukuman, khususnya dengan hukuman yang dilaksanakan di luar penjara (*Probation*) dan Pembebasan Bersyarat (*Parole*).

Berbicara tentang penghukuman yang dilaksanakan di luar penjara (*Probation*) dan Pembebasan Bersyarat (*Parole*), sebagaimana fungsi dan tugas Bapas, sebenarnya sudah berabad-abad lamanya telah dipikirkan di berbagai negara dalam rangka menanggulangi kriminalitas atau kejahatan dengan menerapkan pidana penjara atau

pidana hilang kemerdekaan yang dilaksanakan didalam penjara atau didalam Lembaga Pemasyarakatan.¹⁵³ Akan tetapi kehidupan dan peradaban manusia selalu mengalami perkembangan ke arah kemajuan seiring dengan ilmu pengetahuan yang berkembang sangat pesat dengan teknologi modern, sekalipun demikian dengan segala usaha untuk mencegah berkembangnya kejahatan, kemaksiatan, penyelewengan, dan kenakalan anak, hal tersebut tetap sulit diatasi sehingga mengganggu keamanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam situasi inilah ternyata ilmu pengetahuan, khususnya ilmu mengenai kesejahteraan sosial berkembang, dimulai dari abad ke-XII sampai abad ke-XVI. Salah satu contohnya dapat ditemukan di Inggris, dalam bentuk suatu bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, yang semula dilakukan sebagai kegiatan gereja. Bantuan sosial tersebut untuk membantu dan menolong orang yang mengalami masalah dalam kehidupannya, seperti kemiskinan, yatim piatu, bencana alam dan orang yang dipenjara.

Pengetahuan tentang pekerjaan sosial kemudian berkembang pesat dengan sempurna menjadi ilmu tersendiri, bahkan untuk pelayanan terhadap klien, Bapas telah digunakan metode pekerjaan sosial seperti *Social Case Work*, *Social Group Work* dan *Community Organization* sehingga memudahkan dalam membantu penyelesaian masalah yang dihadapi kliennya dengan menggunakan salah satu metode tersebut. Untuk menjalankan pelayanan sosial tersebut, telah dibuatkan undang-undang sehingga usaha kesejahteraan sosial bagi

masyarakat lebih mudah dicapai, dari sinilah kemudian berlakunya *Social Case Study* atau di Indonesia dikenal dengan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

3. Tugas dan Fungsi Balai Pemasyarakatan

Balai pemasyarakatan merupakan salahsatu unit pelaksanaan teknis dari Direktorat Jendral Pemasyarakatan, yang merupakan pelaksana sistem pemasyarakatan diluar lembaga pemasyarakatan. Salah satu tugasnya adalah membuat penelitian kemasyarakatan. Penelitian kemasyarakatan atau *case study* ini penting sebagai metode pendekatan dalam rangka pembinaan pelanggar hukum. Mengingat penting dan besarnya penelitian kemasyarakatan dalam membantu hakim untuk membuat putusan yang tepat dan seadil-adilnya, dan untuk menentukan terapi pembinaa, isi dari laporan penelitian ini harus menjadi gambaran tentang kehidupan klien baik dimasa lalu atau setelah menjadi klien. Segala masalah yang terkandung dalam kehidupan serta kehidupan sosialnya dapat dicakup dalam isi laporan penelitian kemasyarakatan.

Penelitian kemasyarakatan meliputi:

1. Para pelanggar hukum anak atau orang dewasa baik yang masih dalam status tahanan maupun yang sudah mendapatkan putusan (vonnis) hakim dan anak nakal yang oleh orang tuanya tidak sanggup lagi mengasuhnya dan memohon kepada hakim agar pengasuhannya diserahkan kepada Negara.

2. Terpidana akan diusulkan lepas dengan bersyarat.

Bimbingan kemasyarakatan merupakan pembinaan diluar lembaga pemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan ditujukan kepada seseorang yang tidak dapat menunjukkan fungsi sosialnya dalam masyarakat. Dalam hal belum terdapat pembimbing kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan, tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan dilaksanakan oleh petugas LPKA atau LPAS atau belum terbentuknya LPKA atau LPAS dilakukan oleh petugas rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan.

Petugas kemasyarakatan bertugas :

1. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan diversi, melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak selama proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan, termasuk melaporkannya apabila diversi tidak dilaksanakan;
2. Membuat laporan penelitian kemasyarakatan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan persidangan dalam perkara anak, baik didalam maupun diluar sidang, termasuk LPAS dan LPKS;
3. Menentukan program perawatan anak di LPAS dan pembinaan anak di LPKA bersama petugas kemasyarakatan lainnya.
4. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan anak yang berdasarkan putusan pengadilan dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

5. Melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap anak yang memperoleh asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Bagian ketiga pekerja sosial dan (pasal 65 UU SPPA).

Jadi penulis simpulkan bahwa tugas Bapas adalah melaksanakan pembimbingan terhadap klien diluar Lembaga Pemasyarakatan, adapun fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas), untuk:
 - a. Membantu memperlancar tugas Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim dalam Perkara Anak Nakal, baik di dalam maupun di luar sidang;
 - b. Membantu melengkapi data Warga Binaan Pemasyarakatan dalam pembinaan, yang bersifat mencari pendekatan dan kontak antara Warga Binaan Pemasyarakatan yang bersangkutan dengan masyarakat;
 - c. Bahan pertimbangan bagi Kepala Bapas dalam rangka proses asimilasi dapat tidaknya Warga Binaan Pemasyarakatan menjalani proses asimilasi atau Integrasi Sosial dengan baik.
- 2) Membimbing, membantu, dan mengawasi Warga Binaan Pemasyarakatan yang memperoleh Assimilasi ataupun Integrasi Sosial (Pembinaan Luar Lembaga), baik Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas;
- 3) Membimbing, membantu, dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan Putusan Pengadilan dijatuhi Pidana Bersyarat, Pidana

Pengawasan, Pidana Denda, diserahkan kepada Negara dan harus mengikuti Wajib Latihan Kerja atau Anak yang memperoleh Assimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, maupun Cuti Menjelang Bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

- 4) Mengadakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) dan mengikuti Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan di Lapas / Rutan, guna penentuan program Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
- 5) Membuat Laporan dan Dokumentasi secara berkala kepada Pejabat atasan dan kepada instansi atau pihak yang berkepentingan;
- 6) Meminimalkan penjatuhan pidana pada anak dengan jalan menyarankan dalam Penelitian Kemasyarakatan, baik kepada Penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim;
- 7) Menyelenggarakan Ketatausahaan Bapas.